

Strategi Transformasi Ekonomi Nelayan dan UMKM melalui Kolaborasi dan *Networking* Berbasis *Blue Economy* di Lamongan

Aditya Surya Nanda*, Pramandiyah Fitah Kusuma

Universitas Wijaya Putra

*Email korespondensi: adityasurya@uwp.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the role of collaboration and networking in encouraging the economic transformation of MSMEs and fishermen based on the Blue Economy in Lamongan. Although the coastal area of Lamongan has abundant marine resource potential, the welfare of coastal communities still faces several challenges, including limited market access, weak distribution networks, lack of capital support, and low mastery of seafood processing technology. This research uses a qualitative approach with an exploratory case study design conducted in Lamongan. Data were obtained through in-depth interviews with fishermen, MSME actors, local government, academics, and the private sector, complemented by participatory observation and documentation studies. The results show that multi-actor collaboration among the government, the private sector, academics, and local communities, along with strong networking within fishermen and MSME groups, plays an important role in strengthening the economic competitiveness of coastal communities. Support in the form of product certification, training, equipment assistance, and expanded market access improves production quality, strengthens marketing, and expands business networks to international markets, such as the export of rajungan meat to the United States and shrimp paste products to Europe. Collaboration and networking also strengthen the long-term socio-economic resilience of fishermen and MSMEs through the implementation of zero-waste principles, product diversification, and sustainable marine resource management. This research contributes theoretically to the Blue Economy literature by emphasizing the integration of collaboration and networking in coastal economic transformation and provides practical recommendations for strengthening an inclusive and sustainable blue economy ecosystem in Lamongan.

Keywords: blue economy; collaboration; economic transformation; fishermen; MSMEs

<https://doi.org/10.26740/jim.v14n1.p143-158>

Received: September 30, 2025; Revised: February 20, 2026; Accepted: March 13, 2026; Available online: March 26, 2026

Copyright © 2026, The Authors. Published by Universitas Negeri Surabaya. This is an open access article under the CC-BY International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Sektor kelautan memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, mengingat negara ini merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Potensi sumber daya laut yang melimpah menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi pesisir, khususnya bagi masyarakat nelayan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Hamid & Susilo, 2025). Namun demikian, potensi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat. Nelayan dan UMKM pesisir masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas teknologi pengolahan, fluktuasi harga hasil laut, serta lemahnya jaringan pemasaran. Dalam konteks inilah, konsep *Blue Economy* hadir sebagai paradigma pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, penciptaan nilai tambah melalui diversifikasi produk, serta penerapan prinsip *zero waste* (Zal-zabila & Nur, 2024).

Blue Economy tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga keberlanjutan ekologi dan inklusivitas sosial (Anwar, 2022). Penerapan konsep ini dipandang relevan dalam memperkuat peran UMKM pesisir dan meningkatkan ketangguhan ekonomi masyarakat nelayan, khususnya di wilayah Lamongan yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan basis perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut terbesar di Indonesia. Di sisi lain, penguatan kolaborasi dan *networking* menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi ekonomi nelayan dan UMKM berbasis *Blue Economy*. Kolaborasi multi-aktor yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas lokal, serta lembaga non-pemerintah diyakini mampu membuka akses terhadap modal, teknologi, pasar, dan sertifikasi (Liu & Sukmariningsih, 2021). *Networking* yang kuat juga memungkinkan terbangunnya jejaring produksi dan distribusi yang lebih luas, sehingga hasil laut dan produk olahan UMKM dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji *Blue Economy* di Indonesia, kajian yang secara spesifik menghubungkan transformasi ekonomi nelayan dan UMKM dengan peran kolaborasi dan *networking* masih terbatas (Fauziah, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini diusulkan untuk mengeksplorasi bagaimana jejaring ekonomi dan kolaborasi dapat menjadi instrumen utama dalam mendorong transformasi ekonomi nelayan dan UMKM berbasis *Blue Economy* di Lamongan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur *Blue Economy* sekaligus rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan dan pelaku usaha pesisir.

Meskipun potensi kelautan di Lamongan sangat besar, kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pelaku UMKM, masih relatif rendah. PDRB Kabupaten Lamongan 2024, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (yang mencakup subsektor perikanan) memberikan kontribusi sebesar sekitar 26,74% dari total PDRB Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 dengan nilai PDRB sektor primer sebesar Rp 8.609,58 miliar dari total PDRB Rp 32.185,95 miliar (BPS, 2025). Indonesia periode 2021-2024 menunjukkan dinamika yang mengkhawatirkan. Pada 2021, NTN dan NTUN masing-masing berada di angka 104.69 dan 106.57, mencerminkan stabilitas ekonomi nelayan dan usahanya. Tren positif ini berlanjut hingga 2022, dengan nilai NTN mencapai 106.45 dan NTUN 108.20, menandakan puncak kesejahteraan nelayan dalam periode ini. Namun, dari 2023 hingga 2024 terjadi penurunan signifikan. NTN turun dari 106.45 (2022) menjadi 105.40 (2023) dan anjlok ke 101.76 pada 2024. NTUN juga mengalami tren serupa, turun dari 108.20 (2022) menjadi 106.62 (2023) dan 104.85 pada 2024 (Auna et al., 2025). Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses pasar, lemahnya jaringan distribusi, rendahnya penguasaan teknologi pengolahan, serta minimnya dukungan modal dan sertifikasi yang dapat meningkatkan daya saing produk.

Di sisi lain, upaya kolaborasi dan *networking* dengan berbagai aktor seperti pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas lokal belum sepenuhnya optimal sehingga transformasi ekonomi berbasis *Blue Economy* belum terwujud secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan permasalahan utama, yaitu bagaimana peran kolaborasi dan *networking* dalam mendorong transformasi ekonomi UMKM dan nelayan berbasis *Blue Economy* di Lamongan, faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat, serta strategi apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat jejaring dan kolaborasi tersebut agar lebih berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan peran kolaborasi dan *networking* dalam mendukung transformasi ekonomi nelayan dan UMKM pesisir berbasis *Blue Economy* di Lamongan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi kondisi aktual UMKM dan nelayan dalam memanfaatkan potensi ekonomi pesisir; (2) mengkaji bentuk kolaborasi dan jaringan kerja yang sudah terjalin dengan berbagai pemangku kepentingan; (3) menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam memperkuat jejaring kolaboratif; serta (4) merumuskan strategi penguatan kolaborasi dan *networking* yang efektif untuk mewujudkan ketangguhan ekonomi pesisir yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi (Prajanti et al., 2021).

Kajian mengenai *Blue Economy* di Indonesia telah banyak dilakukan, terutama yang menyoroti potensi sumber daya kelautan, kebijakan pemerintah, dan strategi pengelolaan berkelanjutan. Beberapa penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek ekologi dan pemanfaatan sumber daya laut (misalnya penelitian tentang konservasi pesisir, perikanan tangkap berkelanjutan, serta akuakultur ramah lingkungan). Namun, penelitian-penelitian tersebut relatif kurang mengulas secara mendalam peran

UMKM pesisir sebagai aktor penting dalam rantai nilai ekonomi kelautan. Selain itu, terdapat pula penelitian yang membahas tentang UMKM dan pemberdayaan masyarakat pesisir, tetapi umumnya fokus pada aspek pengolahan hasil laut dan akses pasar tanpa menekankan keterkaitan dengan kerangka *Blue Economy*. Penelitian yang mengangkat kolaborasi multi-aktor juga sudah ada, terutama dalam konteks pembangunan wilayah pesisir, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum secara komprehensif menelaah peran *networking* strategis dalam memperkuat transformasi ekonomi nelayan dan UMKM. Kesenjangan lain terletak pada aspek integrasi antaraktor. Penelitian terdahulu sering menyoroti peran pemerintah atau swasta secara terpisah, sementara sinergi berlapis antara pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas lokal masih jarang dikaji sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi biru. Selain itu, pembahasan tentang ketangguhan sosial-ekonomi (*resilience*) masyarakat pesisir yang dihasilkan dari kolaborasi dan *networking* masih terbatas, padahal hal ini penting untuk menjawab tantangan perubahan iklim, fluktuasi harga, dan dinamika pasar global. Dengan demikian, penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menempatkan transformasi ekonomi nelayan dan UMKM sebagai fokus utama, menggunakan perspektif kolaborasi dan *networking* berbasis *Blue Economy*. Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan literatur dengan memberikan gambaran integratif mengenai bagaimana jejaring ekonomi dan kolaborasi lintas-aktor dapat memperkuat daya saing UMKM, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir di Lamongan.

Lamongan dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu sentra perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan (2024), produksi perikanan tangkap Lamongan mencapai lebih dari 33.883 ton atau 41,51 persen per tahun dengan komoditas unggulan seperti rajungan, udang rebon, dan ikan pelagis (Khakim, 2024). Selain itu, wilayah pesisir Lamongan memiliki konsentrasi UMKM berbasis hasil laut yang cukup tinggi serta telah menjadi sasaran berbagai program penguatan ekonomi pesisir berbasis *Blue Economy*. Namun demikian, meskipun memiliki potensi besar, tingkat kesejahteraan nelayan dan pelaku UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Oleh karena itu, Lamongan menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji dinamika transformasi ekonomi berbasis kolaborasi dan *networking*.

Kajian Pustaka

Konsep Blue Economy

Blue Economy merupakan paradigma pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan berbasis sumber daya laut. Menurut (Andaiyani et al., 2024), konsep ini menekankan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan prinsip *zero waste*, penciptaan nilai tambah, serta keberlanjutan ekologi. Dalam konteks Indonesia, menegaskan *Blue Economy* sebagai arah pembangunan kelautan yang tidak hanya menekankan pada eksploitasi hasil laut, tetapi juga inovasi, diversifikasi produk, dan efisiensi dalam rantai pasok (Huda, 2025). Dengan basis ini, UMKM pesisir berpotensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil laut yang bernilai tambah.

Peran UMKM dalam Perekonomian Pesisir

UMKM merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional, termasuk sektor kelautan. Menurut (Laurensia et al., 2024) UMKM memiliki kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta diversifikasi ekonomi masyarakat pesisir. Produk-produk berbasis hasil laut seperti terasi, rajungan, kerupuk ikan, hingga inovasi olahan modern (nugget, abon, *frozen food*) mampu memperluas pasar domestik maupun internasional. Namun, tantangan yang dihadapi UMKM pesisir meliputi keterbatasan modal, rendahnya akses terhadap teknologi, serta kurangnya sertifikasi produk yang memadai (Tri Utami, 2022).

Kolaborasi dalam Pengembangan Ekonomi Pesisir

Kolaborasi lintas-aktor menjadi strategi penting dalam memperkuat kapasitas nelayan dan UMKM. Teori *Collaborative Governance* menjelaskan bahwa keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh adanya kepercayaan, komitmen bersama, serta mekanisme dialog yang berkelanjutan antara pemerintah,

swasta, akademisi, dan masyarakat (Prajanti et al., 2021). Dalam konteks pesisir, kolaborasi ini dapat berupa program CSR perusahaan, pendampingan teknologi dari perguruan tinggi, maupun dukungan regulasi dan fasilitasi dari pemerintah daerah. Studi oleh (Aji et al., 2023) menunjukkan bahwa kolaborasi multi-aktor dalam pengembangan produk perikanan tangkap dapat meningkatkan nilai tambah dan memperluas akses pasar bagi nelayan.

Networking sebagai Instrumen Pemberdayaan

Networking atau jaringan kerja ekonomi menjadi faktor penting dalam memperkuat posisi tawar nelayan dan UMKM. (Judijanto et al., 2024) menekankan bahwa jejaring sosial berfungsi sebagai modal sosial (social capital) yang dapat membuka peluang akses informasi, pasar, serta dukungan finansial. Bagi UMKM pesisir, *networking* dapat diwujudkan melalui kelompok usaha bersama, koperasi nelayan, hingga asosiasi produsen yang mampu meningkatkan skala produksi dan distribusi. UMKM dengan jejaring pemasaran digital memiliki daya saing yang lebih kuat dalam menghadapi kompetisi global dibandingkan dengan UMKM tradisional yang hanya mengandalkan pasar lokal.

Transformasi Ekonomi dan Ketangguhan Sosial-Ekonomi Pesisir

Transformasi ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut ketangguhan (*resilience*) dalam menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan iklim, fluktuasi harga, maupun ketidakpastian pasar. (Madina & Santoso, 2018) menegaskan bahwa ketangguhan sosial-ekonomi dapat tercapai melalui diversifikasi sumber penghasilan, inovasi produk, serta keberlanjutan ekologi. Dalam konteks penelitian ini, transformasi ekonomi nelayan dan UMKM melalui *Blue Economy* dipahami sebagai upaya membangun ketangguhan jangka panjang dengan memadukan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kesenjangan Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu mengenai *Blue Economy* di Indonesia umumnya masih menekankan aspek ekologi dan konservasi laut (Utami et al., 2018), sementara kajian yang secara spesifik menghubungkan *Blue Economy* dengan transformasi ekonomi UMKM dan nelayan melalui kolaborasi dan *networking* masih terbatas. Beberapa studi yang menyoroti pemberdayaan UMKM (Widhajati & Wulandari, 2021) lebih menekankan pada aspek produksi dan pemasaran, tetapi belum mengintegrasikan perspektif multi-aktor dalam jejaring ekonomi biru. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji peran strategis kolaborasi dan *networking* dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis *Blue Economy* yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang banyak digunakan dalam penelitian ekonomi pesisir dan *Blue Economy* untuk memahami proses transformasi, dinamika sosial-ekonomi, serta pengambilan keputusan pelaku usaha dalam konteks tertentu. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan strategi adaptasi nelayan dan pelaku UMKM pesisir dalam menghadapi tekanan ekonomi dan perubahan lingkungan (Yin, 2018). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memahami jalur transformasi ekonomi yang ditempuh nelayan dan UMKM secara kontekstual, termasuk faktor pendorong, penarik, dan penahan yang memengaruhi keputusan mereka. Studi kasus kualitatif efektif digunakan untuk menelaah fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan kontekstual.

Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh pemahaman kontekstual terkait aktivitas ekonomi, kondisi lingkungan pesisir, serta interaksi sosial antar pelaku usaha. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa laporan kegiatan, arsip program, dan foto lapangan. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan kerangka konseptual *Push Pull Mooring Theory*, *Critical Incident Theory*, dan *Sustainable Livelihood Framework*. Panduan wawancara mencakup pertanyaan terkait tekanan ekonomi (*push factors*), peluang alternatif dan inovasi usaha (*pull factors*), faktor penahan seperti jejaring sosial dan dukungan institusional (*mooring factors*), serta peristiwa kritis yang memengaruhi keputusan transformasi ekonomi.

Data penelitian ini dikumpulkan melalui dua pendekatan, yaitu (1) wawancara mendalam semi-terstruktur secara tatap muka dan (2) dokumentasi. Wawancara menjadi sumber data utama untuk memahami pengalaman dan proses transformasi ekonomi nelayan dan pelaku UMKM pesisir, karena metode ini efektif dalam menggali makna subjektif dan konteks pengambilan keputusan informan (Huberman, 2016). Wawancara semi-terstruktur dilakukan secara individual (*one on one*) dengan durasi rata-rata 35–50 menit per informan. Protokol wawancara disusun mengacu pada prosedur wawancara mendalam (Yin, 2018) dan mencakup dua bagian utama, yaitu karakteristik informan serta pengalaman dan strategi transformasi ekonomi yang ditempuh. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat temuan penelitian melalui triangulasi data.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah pesisir yang memiliki aktivitas utama nelayan dan UMKM berbasis sumber daya laut. Lokasi penelitian dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut mengalami dinamika ekonomi pesisir serta telah menjadi sasaran berbagai program penguatan ekonomi berbasis *Blue Economy*. Subjek penelitian meliputi nelayan dan pelaku UMKM pesisir yang terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi berbasis kelautan. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria: (1) berprofesi sebagai nelayan atau pelaku UMKM pesisir, (2) telah menjalankan usaha minimal lima tahun, dan (3) memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan lingkungan pesisir. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang, yang terdiri dari nelayan dan pelaku UMKM. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data (*data saturation*), di mana wawancara dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak menunjukkan temuan baru. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi risiko, serta strategi adaptasi ekonomi nelayan dan UMKM.

Tabel 1. Informan Penelitian

Variabel	Kategori	Jumlah	Percentase (%)
Kelamin	Laki-Laki	5	41.67
	Perempuan	7	58.33
Umur	31–40 tahun	2	16,67
	41–50 tahun	3	25
	≥51 tahun	7	58.33
Tingkat Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3	25
	Sekolah Menengah Atas (SMA)	7	58,33
	Sarjana (S1)	2	16,67
kategori Informan	Nelayan	4	33.33
	UMKM	8	66.6
Lama Usaha	5–10 tahun	2	16,67
	>10 tahun	10	83.33

Sumber: Data diolah penulis (2026)

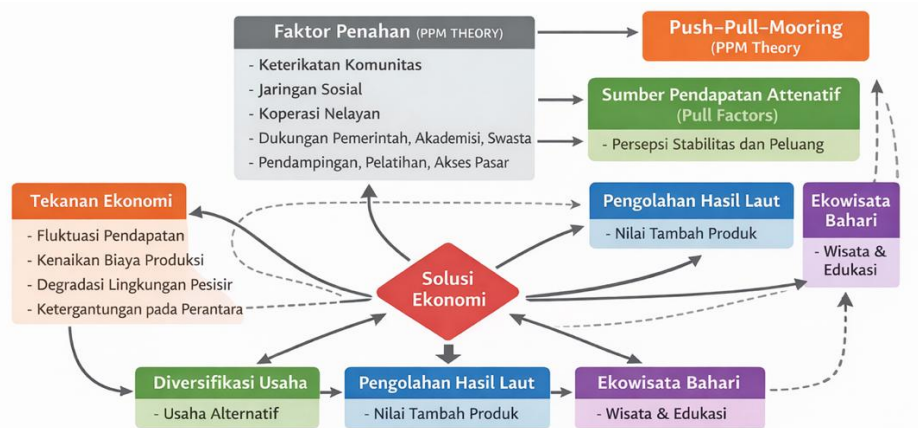
Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik, dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, transkripsi hasil wawancara dilakukan secara verbatim. Kedua, peneliti melakukan open coding untuk mengidentifikasi unit makna yang relevan dengan fokus penelitian. Ketiga, kode-kode yang memiliki kesamaan makna dikelompokkan menjadi kategori. Keempat, kategori tersebut dikonstruksi menjadi tema-tema utama yang merepresentasikan pola transformasi ekonomi, bentuk kolaborasi, serta dinamika *networking*. Proses reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang

relevan dengan tujuan penelitian dan mengeliminasi data yang bersifat repetitif atau tidak berkaitan langsung dengan fokus kajian. melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses pengodean dilakukan secara terbuka untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan jalur transformasi ekonomi nelayan dan UMKM, Berdasarkan hasil analisis tematik, penelitian ini mengidentifikasi empat tema utama, yaitu: Tekanan Ekonomi sebagai Faktor Pendorong Transformasi. Peran *Networking* dalam Memperluas Akses Pasar. Kolaborasi Multi-Aktor sebagai Penguat Ketahanan Ekonomi. Diversifikasi Produk Berbasis Prinsip *Blue Economy*. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi. Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antara nelayan, pelaku UMKM, dan pihak pemerintah daerah. Triangulasi teknik dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara melalui observasi lapangan dan dokumentasi program. Selain itu, member *checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil interpretasi kepada beberapa informan untuk memastikan kesesuaian makna.. Dengan pendekatan dan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika transformasi ekonomi nelayan dan UMKM berbasis *Blue Economy*, serta memperkuat pemahaman mengenai peran jejaring dan kolaborasi dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi pesisir.

Hasil Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transformasi ekonomi nelayan dan UMKM pesisir tidak berlangsung secara linier, Berdasarkan hasil analisis tematik terhadap 12 informan, ditemukan empat tema utama yang berulang, yaitu: (1) tekanan ekonomi sebagai faktor pendorong transformasi; (2) peran *networking* dalam memperluas akses pasar; (3) kolaborasi multi-aktor sebagai penguat ketahanan ekonomi; dan (4) diversifikasi produk berbasis prinsip *Blue Economy*. Keempat tema ini muncul secara konsisten dalam wawancara nelayan dan pelaku UMKM. Melainkan melalui jalur keputusan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, situasional, serta pengalaman kritis yang dialami pelaku usaha. *Networking* merupakan elemen yang menegaskan bahwa nelayan dan UMKM pesisir Lamongan tidak hanya bekerja dalam lingkup lokal, tetapi juga sudah terhubung dengan pasar nasional bahkan internasional. Pertama, jaringan horizontal antar nelayan dan UMKM yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, bahan baku, dan tenaga kerja. Kedua, jaringan vertikal dengan pemerintah, perusahaan swasta, dan akademisi yang menghadirkan akses teknologi, perizinan, dan peluang ekspor. *Networking* sangat krusial karena hasil tangkapan seperti rajungan, udang rebon, dan ikan memiliki nilai ekonomi yang tinggi hanya jika dapat disalurkan ke pasar yang tepat. Rajungan, misalnya, diolah menjadi daging dan diekspor ke Amerika, sementara kulitnya dijual ke pengepul untuk bahan kosmetik. Terasi dipasarkan hingga ke Eropa dan Malaysia, yang menunjukkan adanya penetrasi pasar internasional. Artinya, jaringan tidak hanya meningkatkan akses pasar, tetapi juga mendorong diversifikasi pemanfaatan hasil laut, sehingga tidak ada bagian yang terbuang. Pemerintah sangat berperan melalui fasilitasi sertifikasi halal, PIRT, dan izin edar; perusahaan seperti Shell dan Medco yang memberi pelatihan serta alat; perguruan tinggi seperti ITS, ITB, dan UGM yang memberi pendampingan teknologi; serta komunitas nelayan sendiri yang menjaga kontinuitas produksi. Mekanisme ini dijalankan melalui forum kelompok, pelatihan, program CSR, dan penggunaan teknologi digital sederhana seperti grup *WhatsApp*.

Model pada Gambar 1 dikonstruksi berdasarkan hasil analisis tematik yang mengintegrasikan empat tema utama penelitian. Model ini merepresentasikan hubungan antara tekanan ekonomi, insiden kritis, kekuatan jejaring, dan kolaborasi multi-aktor dalam membentuk jalur transformasi ekonomi nelayan dan UMKM pesisir. Jalur transformasi pada Gambar 1 tersebut merepresentasikan dinamika pengambilan keputusan nelayan dan UMKM dalam merespons tekanan ekonomi, keterbatasan sumber daya, serta peluang adaptasi yang tersedia. Secara teoretis, pola transformasi ini dapat dijelaskan melalui *Push Pull Mooring Theory* (PPM), yang dalam studi-studi mutakhir banyak digunakan untuk menganalisis perilaku perpindahan, *switching behavior*, dan transformasi ekonomi pada sektor jasa, tenaga kerja, serta ekonomi digital (Xu et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, faktor pendorong (*push factors*) muncul dari tekanan negatif yang dialami nelayan dan UMKM, seperti fluktuasi harga hasil tangkapan, peningkatan biaya operasional, ketergantungan pada tengkulak, serta degradasi lingkungan pesisir.



Sumber: Hasil Analisis Peneliti (2025)

Gambar 1. Integrasi Model Transformasi Ekonomi Nelayan dan UMKM

Tekanan-tekanan menurunkan stabilitas pendapatan dan memperbesar risiko ekonomi, sehingga memicu munculnya niat untuk melakukan perubahan strategi usaha (Xu et al., 2021). Di sisi lain, faktor penarik (*pull factors*) tercermin dari adanya alternatif sumber pendapatan yang dianggap lebih stabil dan pasti di luar ekosistem pesisir. Beberapa informan memandang sektor non-pesisir atau usaha lain sebagai pilihan rasional untuk mengurangi ketidakpastian ekonomi. Namun, keputusan untuk berpindah tidak sepenuhnya didorong oleh daya tarik alternatif tersebut, melainkan dipengaruhi secara signifikan oleh faktor penahan (*mooring factors*). Faktor penahan dalam penelitian ini meliputi keberadaan jaringan sosial, keterikatan komunitas nelayan, koperasi, serta dukungan dari pemerintah, akademisi, dan sektor swasta melalui program pendampingan, pelatihan, dan bantuan alat produksi. Temuan ini sejalan dengan pengembangan terbaru PPM Theory yang menekankan bahwa faktor mooring memiliki peran dominan dalam menentukan apakah individu atau kelompok akan bertahan atau berpindah (Monoarfa et al., 2025). Ketika faktor penahan cukup kuat, nelayan dan UMKM cenderung memilih untuk tetap berada dalam ekosistem pesisir dan melakukan transformasi internal melalui diversifikasi usaha, peningkatan nilai tambah, serta penerapan prinsip *Blue Economy*.

Penelitian ini menemukan bahwa keputusan transformasi sering kali dipercepat oleh adanya insiden kritis (*critical incidents*), seperti kerugian ekonomi yang signifikan, gagal panen akibat cuaca ekstrem, atau kesulitan akses modal dalam jangka waktu lama. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui *Critical Incident Theory* (CIT), yang dalam kajian kontemporer digunakan untuk memahami titik balik keputusan individu dalam konteks krisis dan ketidakpastian (Butterfield et al., 2024). Insiden kritis berfungsi sebagai katalis yang memperkuat persepsi risiko dan mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga nelayan dan UMKM tidak lagi berada pada fase mempertimbangkan, tetapi langsung menentukan jalur transformasi ekonomi yang dipilih. *Critical Incident Theory* (CIT) dalam penelitian ini tidak dipahami sebagai peristiwa langka yang unik secara absolut, melainkan sebagai kejadian krisis yang memiliki dampak signifikan terhadap perubahan perilaku ekonomi pelaku usaha. Insiden seperti kerugian besar akibat cuaca ekstrem, kegagalan produksi, atau jatuhnya harga secara drastis menjadi titik balik (*turning point*) yang mengubah orientasi strategi usaha nelayan dan UMKM. Dengan demikian, CIT digunakan untuk mengidentifikasi momen-momen krusial yang mempercepat proses transformasi ekonomi.

Dalam perspektif keberlanjutan, jalur transformasi yang ditunjukkan pada Gambar 1 juga relevan dengan *Sustainable Livelihood Framework* (SLF). Kerangka ini menegaskan bahwa strategi penghidupan ditentukan oleh kombinasi aset yang dimiliki dan tingkat kerentanan yang dihadapi (Abraham, 2021). Nelayan dan UMKM yang memiliki akses lebih baik terhadap modal sosial, pengetahuan, dan dukungan institusional menunjukkan kecenderungan untuk bertahan dan bertransformasi secara adaptif di dalam ekosistem pesisir. Transformasi tersebut diwujudkan melalui penguatan rantai nilai, pemanfaatan limbah hasil laut, serta inovasi produk berbasis sumber daya lokal

yang selaras dengan *prinsip Blue Economy*. Lebih lanjut, keberhasilan jalur transformasi yang tetap berada dalam ekosistem pesisir tidak dapat dilepaskan dari praktik *collaborative governance*. Kolaborasi lintas aktor pemerintah, komunitas, akademisi, dan sektor swasta merupakan prasyarat utama dalam membangun ketahanan ekonomi lokal dan keberlanjutan sumber daya (Nasution & Hakim, 2024). Dalam penelitian ini, kolaborasi tersebut berperan sebagai mekanisme penguat faktor *mooring* yang mampu menahan laju keluar dari sektor pesisir dan mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Melalui efisiensi pemanfaatan sumber daya laut, sehingga tidak ada limbah yang terbuang. Ketiga, dengan mengedepankan praktik ramah lingkungan, misalnya menjaga kebersihan laut agar produktivitas ekosistem tetap terjaga. Hal ini mencerminkan prinsip *Blue Economy* (Harun, 2024) yang menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan keberlanjutan ekologi dan inklusi sosial. Kapan kerja sama multi-aktor ini berjalan? Pada umumnya, mekanisme kolaborasi ini berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. Misalnya, pemerintah daerah memfasilitasi sertifikasi halal, swasta melalui CSR menyediakan alat tangkap atau *freezer*, akademisi memberikan pelatihan teknologi pengolahan, sementara komunitas lokal memastikan distribusi dan pemasaran tetap lancar. Dengan kerja sama berlapis ini, ekonomi pesisir tidak hanya tumbuh dalam jangka pendek, tetapi juga memiliki ketangguhan jangka panjang.

Kerja sama berlapis yang dimaksud adalah kolaborasi yang melibatkan nelayan, UMKM, pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas lokal yang saling melengkapi dalam satu ekosistem ekonomi pesisir. Kolaborasi ini tidak bersifat satu kali atau parsial, tetapi berlapis dan berkelanjutan, di mana setiap lapisan memberikan kontribusi berbeda yang saling menguatkan. Dalam jangka pendek, kerja sama ini menghasilkan pertumbuhan ekonomi langsung. Nelayan mendapatkan bantuan alat tangkap, UMKM memperoleh pelatihan dan sertifikasi, serta akses pasar diperluas melalui dukungan perusahaan atau pemerintah. Dampaknya dapat dirasakan secara cepat dalam bentuk peningkatan produktivitas, naiknya kualitas produk, dan bertambahnya pendapatan keluarga pesisir. Misalnya, daging rajungan bisa langsung diekspor, terasi memperoleh sertifikat halal untuk menembus pasar internasional, atau sambal rujak dipasarkan melalui jejaring kelompok ibu-ibu nelayan. Ini adalah hasil-hasil nyata yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Namun, kerja sama berlapis ini tidak berhenti pada keuntungan sesaat.

Validasi temuan dilakukan melalui konsistensi pernyataan antar informan serta triangulasi dengan data observasi dan dokumentasi program. Pola mengenai pentingnya *networking* dan kolaborasi muncul secara berulang dalam wawancara nelayan, dan pelaku UMKM, sehingga memperkuat kredibilitas temuan penelitian.

Pembahasan

Solidaritas dan Kolaborasi Komunitas Nelayan

Solidaritas sosial dan kolaborasi internal merupakan fondasi utama bagi nelayan di Lamongan dalam menjaga keberlangsungan usaha mereka. Kelompok nelayan atau paguyuban tidak hanya berfungsi sebagai sarana organisasi formal, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mengikat anggota melalui hubungan emosional, rasa saling percaya, dan kebersamaan. Kolaborasi menjadi komponen yang penting karena nelayan secara individual memiliki keterbatasan: mereka rentan terhadap cuaca, fluktuasi harga, serta keterbatasan akses modal dan teknologi. Dengan adanya paguyuban, risiko tersebut dapat diminimalisasi. Misalnya, ketika salah satu anggota mengalami kendala, kelompok akan hadir sebagai penyedia dukungan, baik dalam bentuk tenaga, pinjaman modal, maupun informasi. Mekanisme dukungan ini berlangsung melalui pertemuan rutin, forum diskusi, dan aktivitas gotong royong yang sudah menjadi budaya masyarakat pesisir. Solidaritas kelompok nelayan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi tercermin dalam praktik nyata. Informan 1 menyatakan: “Kalau ada anggota yang kapalnya rusak, biasanya kami bantu tenaga atau pinjaman dulu supaya tetap bisa melaut.” Informan lain menegaskan: “Kami tidak jalan sendiri-sendiri. Kalau ada informasi tentang harga, langsung dibagikan di grup supaya semua tahu.” (Informan 4, Nelayan, 51 tahun), Konsistensi

pernyataan antar informan menunjukkan bahwa solidaritas dan modal sosial merupakan pola yang berulang, bukan kasus individual.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Khairussalam et al., 2023) yang menekankan bahwa *social capital* yang terdiri dari jaringan, norma, dan kepercayaan dapat memfasilitasi koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan bersama. Dalam konteks Lamongan, *bonding social capital* tercermin dari eratnya hubungan internal antar nelayan, sementara *bridging social capital* terlihat dari jalinan kerja sama mereka dengan pihak luar seperti pemerintah dan swasta. Sejalan dengan penelitian (Yamin & Dartanto, 2023) demikian, solidaritas kelompok menjadi basis penting bagi terciptanya *resilience* atau ketangguhan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Ketergantungan Tinggi pada Sumber Daya Laut Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, sangat bergantung pada hasil laut untuk kelangsungan hidup dan perekonomian keluarganya.

Ketika cuaca buruk, musim paceklik, atau terjadi penurunan stok ikan, otomatis pendapatan mereka ikut turun. Resiliensi menjadi penting karena mampu membantu nelayan bertahan menghadapi guncangan alam dan pasar. Tanpa resiliensi, nelayan sangat rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem saat terjadi krisis. Fluktuasi harga dan Ketidakpastian pasar hasil laut adalah komoditas yang harganya sangat fluktuatif sejalan dengan penelitian (Huda, 2025). Saat musim panen raya, harga bisa jatuh drastis, sementara ketika stok sedikit, harga melonjak. Resiliensi diperlukan agar nelayan mampu mengelola risiko pasar, misalnya dengan melakukan diversifikasi produk, mengolah hasil laut menjadi produk bernilai tambah, atau memanfaatkan jaringan pasar yang lebih luas. Kerentanan Sosial dan akses yang terbatas selain ekonomi, nelayan juga menghadapi kerentanan sosial (terbatasnya akses pendidikan, kesehatan, dan modal usaha). Tanpa resiliensi sosial, mereka mudah terjebak dalam lingkaran kemiskinan (Novianto, 2022). Dengan resiliensi, nelayan dapat memperkuat modal sosial (*social capital*) melalui paguyuban, kelompok nelayan, atau organisasi perempuan seperti PIN. Kelompok-kelompok ini menjadi ruang untuk saling bantu, memperkuat solidaritas, dan meminimalisasi kerentanan sosial. Dampak perubahan iklim dan kerusakan Lingkungan Masyarakat pesisir adalah pihak yang paling terdampak perubahan iklim (Harmoni, 2025).

Resiliensi ekologis sangat penting agar masyarakat pesisir mampu beradaptasi dengan perubahan iklim melalui praktik ramah lingkungan, menjaga kebersihan laut, serta memanfaatkan setiap hasil laut tanpa limbah. Kemandirian Ekonomi dan Pemberdayaan Perempuan, resiliensi juga terkait dengan kemandirian ekonomi lokal. Ketangguhan akan tercapai jika nelayan dan UMKM tidak hanya menjual hasil laut mentah, tetapi juga mampu mengolah, memasarkan, dan mengeksport (Ekonomi et al., 2021). Peran perempuan dalam UMKM pesisir sangat penting, karena memperluas sumber pendapatan keluarga. Hal ini menciptakan resiliensi ekonomi rumah tangga, sehingga tidak hanya bergantung pada hasil melaut. Selaras dengan Agenda *Blue Economy* dan Kebijakan Nasional Pemerintah Indonesia telah menempatkan *Blue Economy* sebagai strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan (Pertiwi, 2020). Dalam kerangka ini, resiliensi masyarakat pesisir menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan sosial dan lingkungan. Artinya, resiliensi adalah syarat agar masyarakat pesisir tidak tertinggal dalam arus globalisasi dan perubahan ekonomi dunia.

Networking, Akses Pasar, dan Dukungan Eksternal

Temuan ini menguatkan hasil penelitian (Munir, 2021) tentang *collaborative governance*, di mana pembangunan berbasis komunitas hanya bisa berhasil jika ada kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi. Dukungan eksternal juga sejalan dengan konsep *Blue Economy* yang dikemukakan (Wahyu, 2020) bahwa pertumbuhan ekonomi pesisir harus memanfaatkan kerja sama multi-aktor untuk mengoptimalkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi pesisir pada hakikatnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sumber daya laut yang melimpah. Namun, potensi laut yang besar tidak akan mampu memberikan kesejahteraan secara optimal apabila dikelola hanya oleh satu pihak, misalnya nelayan secara individu. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah kerja sama multi-aktor yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, komunitas lokal, dan organisasi masyarakat sipil dalam

kerangka pembangunan yang inklusif sejalan dengan penelitian (Susniwati & Kurhayadi, 2020). Salah satu informan UMKM menyatakan: “*Dulu kami hanya jual ke pengepul, harganya tidak stabil. Setelah ada pendampingan dan jaringan ekspor, rajungan bisa masuk pasar Amerika dan Belanda yang harganya lebih tinggi.*” (Informan 6, UMKM, 48 tahun) Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan nelayan: “*Kalau tidak ikut kelompok dan jaringan, sulit masuk pasar besar. Sekarang lewat kelompok nelayan, kami bisa kirim lebih banyak dan harga lebih bagus.*” (Informan 2, Nelayan, 54 tahun). Prinsip ini sejalan dengan model *collaborative governance* yang menekankan pentingnya sinergi berbagai pihak dalam menghadapi kompleksitas masalah pembangunan. Masing-masing aktor memiliki peran, keunggulan, dan keterbatasan yang berbeda. Nelayan dan UMKM memiliki sumber daya utama berupa hasil laut dan pengetahuan lokal, namun terbatas pada modal, akses pasar, dan teknologi.

Pemerintah berperan menyediakan regulasi, kebijakan, serta fasilitasi sertifikasi dan legalitas usaha. Swasta memiliki modal, jaringan pasar, dan kapasitas investasi yang dapat menghubungkan produk lokal dengan rantai pasok global. Akademisi hadir dengan riset, inovasi teknologi, serta pendampingan peningkatan kapasitas masyarakat. Sementara komunitas nelayan dan organisasi perempuan, seperti Persaudaraan Ibu-ibu Nelayan (PIN), berperan menjaga kohesi sosial dan memperkuat inklusivitas. Ketika semua peran ini dikolaborasikan, terbentuklah sebuah ekosistem ekonomi pesisir yang tangguh dan berkelanjutan. Kerjasama harus mendukung kerjasama melalui diversifikasi usaha, di mana hasil laut tidak hanya dijual mentah tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah, seperti rajungan yang diekspor, kulit rajungan yang dijadikan bahan baku kosmetik, hingga trasi dan sambal yang dipasarkan internasional.

Setiap lapisan kolaborasi menciptakan pondasi yang memperkuat daya tahan ekonomi pesisir. Pemerintah menghadirkan regulasi dan legalitas yang memastikan produk UMKM bisa bertahan di pasar formal. Swasta memberikan investasi dan akses rantai pasok global yang membuka peluang ekspor berkelanjutan. Akademisi berkontribusi melalui riset dan inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Sementara komunitas nelayan dan UMKM menjaga solidaritas sosial agar tidak ada yang tertinggal. Semua ini menjadikan ekonomi pesisir lebih tangguh menghadapi guncangan, seperti fluktuasi harga, perubahan iklim, atau dinamika pasar global. Ketangguhan jangka panjang ini juga lahir dari diversifikasi usaha dan inklusivitas. Nelayan tidak hanya bergantung pada satu komoditas, tetapi mampu mengolah hasil laut menjadi berbagai produk bernilai tambah. Perempuan pun dilibatkan aktif dalam rantai produksi, sehingga beban ekonomi keluarga terbagi dan sumber pendapatan lebih stabil sejalan dengan penelitian (Waqiah et al., 2019).

Inklusif, Tantangan Harga, dan Keberlanjutan

Dimensi lain yang muncul kuat dalam hasil penelitian adalah inklusivitas gender dalam ekonomi pesisir. Perempuan nelayan, melalui organisasi Persaudaraan Ibu-ibu Nelayan (PIN), menjadi aktor kunci dalam mengembangkan UMKM berbasis hasil laut. Perempuan terlibat dalam pengolahan produk bernilai tambah, seperti sambal rujak, kerupuk cumi, nugget ikan, hingga olahan rajungan. Perempuan tidak hanya berkontribusi terhadap pendapatan keluarga, tetapi juga memperluas jaringan pemasaran melalui inovasi, baik offline maupun digital. UMKM perempuan mampu mengakses pasar yang lebih luas tanpa harus bergantung pada jalur distribusi konvensional. Sejalan dengan penelitian (Yusriadi et al., 2020) yang menemukan bahwa pemberdayaan perempuan dalam UMKM pesisir meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga sekaligus memperkuat kohesi sosial. Namun, penelitian ini juga menemukan tantangan besar, yaitu fluktuasi harga hasil laut. Tantangan ini menunjukkan bahwa meski akses pasar terbuka, nelayan tetap rentan terhadap mekanisme pasar global yang tidak stabil. Ketergantungan pada musim dan harga internasional sering membuat pendapatan nelayan naik-turun drastis. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Maulana & Suyono, 2023) yang menyoroti kerentanan struktural nelayan di Lamongan akibat volatilitas harga.

Perempuan tidak hanya terlibat dalam pengolahan produk bernilai tambah seperti sambal rujak, kerupuk cumi, nugget ikan, dan olahan rajungan, tetapi juga dalam pengelolaan pemasaran dan distribusi. Salah satu informan perempuan menyatakan: “*Kalau hanya mengandalkan suami melaut, kadang tidak cukup. Kami ibu-ibu harus ikut mengolah supaya ada tambahan penghasilan.*” (Informan 9, UMKM

Perempuan, 43 tahun), Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan tidak sekadar pelengkap, melainkan menjadi strategi adaptif dalam memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga pesisir. Informan lain menambahkan: “Sekarang kami sudah bisa jual lewat WhatsApp dan ikut pameran dari dinas. Dulu hanya jual di kampung.” (Informan 11, UMKM Perempuan, 38 tahun) Hal ini memperlihatkan adanya transformasi akses pasar melalui jejaring dan dukungan eksternal. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan tantangan besar berupa fluktuasi harga hasil laut yang sangat dipengaruhi musim dan pasar global. Seorang nelayan menyampaikan: “Kalau musim rajungan banyak, harga bisa turun. Kadang tidak sebanding dengan biaya solar dan perawatan kapal.” (Informan 2, Nelayan, 54 tahun) Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun akses pasar terbuka, nelayan tetap rentan terhadap volatilitas harga dan ketidakpastian pasar. Kondisi ini menegaskan pentingnya diversifikasi dan pengolahan hasil laut sebagai strategi pengurangan risiko.

Dengan memperkuat kolaborasi, menjaga kualitas produk, dan memanfaatkan setiap bagian hasil laut agar tetap bernilai ekonomi. Upaya diversifikasi dan efisiensi yang selaras dengan prinsip *Blue Economy* tidak ada limbah, semua dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologi. Salah satu prinsip utama dalam *Blue Economy* adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya laut, di mana setiap hasil tangkapan ataupun produk turunan laut harus dikelola sedemikian rupa sehingga tidak ada yang terbuang percuma. Konsep ini berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada eksploitasi tanpa memperhatikan dampak ekologis maupun keberlanjutan rantai nilai. Pendekatan *Blue Economy*, laut tidak hanya dipandang sebagai sumber bahan mentah, tetapi sebagai ekosistem berharga yang perlu dijaga keseimbangannya agar mampu terus memberi manfaat ekonomi di masa depan. Dalam konteks nelayan dan UMKM pesisir. Dalam konteks keberlanjutan, prinsip *Blue Economy* juga tercermin dalam praktik pemanfaatan hasil laut secara menyeluruh. Seorang pelaku UMKM menjelaskan: “Daging rajungan kami kirim untuk ekspor ke Amerika dan Eropa, kulitnya tidak dibuang. Ada pengepul yang ambil untuk bahan lain, biasanya buat kosmetik” (Informan 6, UMKM, 48 tahun) Praktik ini menunjukkan penerapan prinsip *zero waste* yang tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mengurangi limbah dan menjaga ekosistem pesisir. Daging rajungan diolah untuk kebutuhan ekspor, sementara kulitnya dimanfaatkan oleh pengepul untuk dijadikan bahan baku industri lain, termasuk kosmetik. Hal ini tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa hasil laut digunakan secara optimal tanpa menghasilkan sampah yang merusak lingkungan. Konsep pemanfaatan total ini juga berlaku pada produk lain, seperti udang rebon yang diolah menjadi trasi berkualitas, atau ikan yang diolah menjadi nugget, kerupuk cumi, dan produk sambal (Mealy & Teytelboym, 2022). Dengan strategi ini, hasil tangkapan yang semula hanya dijual dalam bentuk mentah dapat dikonversi menjadi produk olahan bernilai lebih tinggi, yang memperpanjang umur ekonominya dan memperluas jangkauan pasar hingga ke tingkat internasional.

Transformasi serta Kolaborasi Ekonomi Nelayan dan UMKM

Transformasi ekonomi nelayan dan UMKM pesisir dalam penelitian ini merupakan proses adaptif yang dipengaruhi oleh kombinasi tekanan ekonomi, pengalaman kritis, serta kekuatan jejaring sosial dan institusional. Karakteristik informan yang didominasi oleh pelaku usaha berusia di atas 50 tahun dan memiliki pengalaman usaha lebih dari sepuluh tahun menunjukkan bahwa keputusan transformasi tidak diambil secara spekulatif, melainkan berdasarkan pengalaman empiris yang panjang dalam menghadapi dinamika ekonomi pesisir. Salah satu informan nelayan menyatakan: “Sudah puluhan tahun melaut, kami tahu kapan hasil bagus dan kapan sulit. Sekarang kalau hanya mengandalkan tangkapan saja tidak cukup, harus ada usaha lain.” (Informan 1, Nelayan, 55 tahun), Pernyataan ini mengindikasikan adanya push factor berupa fluktuasi pendapatan dan ketidakpastian hasil tangkapan yang mendorong munculnya kebutuhan diversifikasi ekonomi. Temuan ini memperkuat *Push Pull Mooring Theory*, di mana faktor pendorong berupa fluktuasi pendapatan, ketidakpastian hasil tangkapan, dan peningkatan biaya operasional menjadi tekanan struktural yang dirasakan secara langsung oleh nelayan dan UMKM. Sebaliknya, faktor penahan (*mooring factors*) berupa jaringan sosial, keterikatan komunitas, serta dukungan institusional menjadi elemen yang memperkuat keputusan untuk bertahan dan bertransformasi di dalam ekosistem pesisir. Seorang pelaku UMKM menjelaskan: “Karena ada kelompok dan koperasi, kami tidak merasa jalan sendiri. Kalau ada pelatihan atau bantuan alat,

informasinya cepat menyebar.” (Informan 7, UMKM, 45 tahun) Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi multi-aktor tidak hanya bersifat formal, tetapi berfungsi sebagai mekanisme pengurang risiko dan penguat kepercayaan dalam mengambil keputusan ekonomi.

Keberadaan jaringan sosial, keterikatan komunitas, koperasi, serta pendampingan dari pemerintah dan akademisi terbukti memperkuat kepercayaan pelaku usaha untuk tetap bertahan dalam ekosistem pesisir. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian mutakhir yang menyatakan bahwa kekuatan modal sosial dan institusional sering kali lebih menentukan dibanding faktor penarik eksternal dalam keputusan bertahan atau berpindah (Sun et al., 2022; Li & Du, 2024). Dengan demikian, transformasi yang terjadi lebih bersifat internal, melalui diversifikasi usaha dan peningkatan nilai tambah, daripada perpindahan sektor secara total. Pembahasan ini juga menunjukkan bahwa insiden kritis (critical incidents) berperan sebagai pemicu utama percepatan transformasi ekonomi. Pengalaman kerugian signifikan, tekanan modal, serta dampak cuaca ekstrem menjadi titik balik yang mengubah pola pikir nelayan dan UMKM dari sekadar bertahan menuju upaya transformasi yang lebih strategis. Perspektif ini sejalan dengan Critical Incident Theory, yang menekankan bahwa keputusan penting sering kali dipicu oleh peristiwa luar biasa yang memperkuat persepsi risiko dan urgensi perubahan (Hughes et al., 2021). Dalam konteks penelitian ini, insiden kritis tidak selalu mendorong keluar dari sektor pesisir, tetapi justru memperkuat kesadaran akan pentingnya inovasi dan kolaborasi.

Jalur transformasi yang tetap berada dalam ekosistem pesisir dapat dipahami melalui *Sustainable Livelihood Framework* (SLF). Informan yang memiliki akses lebih baik terhadap modal sosial dan institusional menunjukkan kapasitas adaptasi yang lebih tinggi dalam menghadapi kerentanan ekonomi. Transformasi ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara lebih efisien, seperti pengolahan hasil laut bernilai tambah, diversifikasi produk UMKM, serta penerapan prinsip efisiensi dan keberlanjutan yang sejalan dengan konsep *Blue Economy*. Hal ini memperkuat pandangan bahwa keberlanjutan ekonomi pesisir tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada penguatan aset sosial dan pengetahuan. Selain itu, pembahasan ini menegaskan pentingnya *collaborative governance* dalam menopang jalur transformasi ekonomi nelayan dan UMKM.

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan komunitas lokal terbukti memperkuat faktor penahan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi serta keberlanjutan usaha. Praktik kolaboratif ini berfungsi sebagai mekanisme pengurang risiko dan sekaligus memperluas akses terhadap pasar, teknologi, dan pembiayaan. Temuan ini konsisten dengan literatur terbaru yang menekankan bahwa tata kelola kolaboratif merupakan prasyarat utama dalam pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan (Emerson & Nabatchi, 2022). Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi nelayan dan UMKM pesisir bukanlah proses berpindah atau bertahan secara dikotomis, melainkan proses negosiasi berkelanjutan antara tekanan, peluang, dan dukungan. Integrasi antara *PPM Theory*, *Critical Incident Theory*, *Sustainable Livelihood Framework*, dan *Collaborative Governance* memberikan kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami dinamika tersebut. Hasil penelitian ini memperkaya literatur *Blue Economy* dengan menekankan bahwa keberhasilan transformasi ekonomi pesisir sangat ditentukan oleh penguatan jejaring dan kolaborasi, bukan semata-mata oleh dorongan pasar atau tekanan lingkungan.

Diversifikasi produk menjadi instrumen utama untuk mendukung keberlanjutan ekonomi. Dari sisi ekologis, pemanfaatan hasil laut secara menyeluruh juga berfungsi sebagai bentuk pengelolaan limbah yang cerdas. Jika limbah kulit rajungan atau sisa hasil laut dibiarkan menumpuk, maka akan berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan merusak ekosistem laut. Namun, ketika limbah tersebut dijadikan bahan baku industri lain, maka masalah lingkungan dapat dikurangi, bahkan diubah menjadi peluang ekonomi baru. Hal ini sejalan dengan konsep *circular economy*, di mana siklus produksi tidak berhenti pada konsumsi, tetapi terus berputar melalui daur ulang dan pemanfaatan kembali. Kesadaran sederhana ini mencerminkan bahwa masyarakat pesisir memahami keterkaitan antara kebersihan lingkungan laut dan produktivitas hasil tangkapan mereka (Veronica et al., 2022). Dengan menjaga lingkungan, nelayan tidak hanya melindungi ekosistem laut, tetapi juga menjaga keberlangsungan sumber penghidupan mereka sendiri. Dari sudut pandang kebijakan, strategi pemanfaatan hasil laut tanpa limbah ini mendukung agenda pembangunan berkelanjutan pemerintah, khususnya dalam Asta Cita yang

menekankan transisi menuju ekonomi sirkular dan ramah lingkungan. Dengan mengoptimalkan seluruh bagian hasil laut, kebijakan ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar global, tetapi juga menjawab tantangan perubahan iklim dan degradasi ekosistem laut.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan *Push Pull Mooring Theory*, *Critical Incident Theory*, *Sustainable Livelihood Framework*, dan *Collaborative Governance* dalam satu kerangka analitis untuk menjelaskan transformasi ekonomi pesisir berbasis Blue Economy. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan aspek ekologi, pemberdayaan UMKM, atau kolaborasi secara parsial, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor mooring berupa jejaring sosial dan kolaborasi multi aktor menjadi determinan dominan dalam mempertahankan dan mentransformasikan ekonomi nelayan di dalam ekosistem pesisir.

Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian, dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa transformasi ekonomi tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui suatu proses bertahap yang dipengaruhi oleh faktor pendorong, faktor penarik, dan faktor penguat. Faktor pendorong utama berasal dari ketidakstabilan pendapatan sebagai nelayan, yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca, hasil tangkapan yang tidak menentu, serta meningkatnya biaya operasional. Kondisi tersebut menjadi pemicu bagi nelayan untuk mencari sumber pendapatan alternatif yang lebih stabil. Di sisi lain, faktor penarik berupa peluang usaha UMKM yang lebih fleksibel, potensi peningkatan pendapatan, serta dukungan dari lingkungan sosial mendorong nelayan untuk melakukan diversifikasi usaha.

Proses transformasi ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor penguat, seperti pengalaman usaha, dukungan keluarga, jaringan sosial, dan kemampuan adaptasi individu. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam meningkatkan keberhasilan nelayan dalam mengembangkan usaha UMKM secara berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang dilakukan nelayan tidak selalu berarti meninggalkan pekerjaan utama sebagai nelayan, tetapi lebih kepada strategi diversifikasi ekonomi untuk meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga. Dengan demikian, transformasi ekonomi yang terjadi bersifat adaptif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan serta keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah informan dalam penelitian ini terbatas, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh masyarakat pesisir. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman informan dalam proses transformasi ekonomi.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual dan bergantung pada persepsi serta pengalaman subjektif informan. Meskipun pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam, namun tidak dapat mengukur secara kuantitatif besarnya pengaruh masing-masing faktor terhadap transformasi ekonomi.

Ketiga, penelitian ini hanya berfokus pada transformasi ekonomi dari sektor perikanan menuju sektor UMKM, sehingga belum mengkaji secara komprehensif peran faktor eksternal lainnya, seperti kebijakan pemerintah, akses terhadap permodalan formal, dan dukungan kelembagaan secara lebih luas.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan jumlah informan agar memperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai transformasi ekonomi masyarakat pesisir. Penggunaan pendekatan mixed-method dengan mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif juga direkomendasikan agar dapat mengukur secara lebih objektif pengaruh faktor-faktor yang memengaruhi transformasi ekonomi serta memperkuat validitas temuan. Selain itu, penelitian mendatang perlu mengkaji secara lebih mendalam peran faktor eksternal, seperti kebijakan

pemerintah, akses pembiayaan formal, pelatihan kewirausahaan, dan dukungan kelembagaan dalam mendukung keberhasilan transformasi ekonomi masyarakat pesisir. Pengembangan model konseptual yang lebih komprehensif juga penting untuk memberikan kontribusi teoritis yang lebih kuat terhadap literatur pemberdayaan ekonomi berbasis *Blue Economy*.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian ini. Seluruh proses penelitian dan penulisan artikel ini dilakukan secara independen, tanpa adanya kepentingan pribadi, komersial, atau institusional yang dapat memengaruhi hasil atau interpretasi dari penelitian ini

Daftar Pustaka

- Abraham, E. (2021). *Munich Personal RePEc Archive Sustainable Livelihood Framework for Equitable Living in Crisis of Global Pandemic*. 106951.
- Aji, G., Prasetyo, A. D., Rakhman, K. F., & Vanessa, G. A. (2023). Pemberdayaan UMKM Halal melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pekalongan: Meraih Daya Saing Global Melalui Inovasi dan Kolaborasi. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(4), 412–420. <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekkes/article/view/739%0Ahttps://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/jupiekkes/article/download/739/745>
- Andaiyani, S., Marwa, T., & Nurhaliza, S. (2024). Ekonomi Biru dan Ketahanan Pangan: Studi Empiris Provinsi Kepulauan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 13(1), 69–85.
- Anwar, M. (2022). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Masalah Ekonomi Dan Multilateral. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 343–356. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1s.1905>
- Auna, E., Kurniawan, & Bidayani, E. (2025). Analisis Nilai Tukar Nelayan (NTN) Alat Tangkap Gill Net di Kecamatan Sungailiat Analysis of Fishermen's Exchange Rate (NTN) for Gill Net Fishing Gear in Sungailiat District. *Akuatik*, 17(1). <https://doi.org/10.33019/akuatik.v13i1.107>
- BPS. (2025). *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lamongan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, 2025* (p. 2). Badan Pusat Statistik. https://lamongankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU3IzI%3D/produk-domestik-regional-bruto-kabupaten-lamongan-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha.html?utm_source
- Butterfield, L., Borgen, W., Amundson Norman, & Maglio< Sophia. (2024). Fifty Years of Critical Incident Teqnique 1954-2004 dan Beyond. *SAGE Publication*, 5(4), 475–497.
- Ekonomi, S., Fakultas, S., Islam, E., Djuanda, U., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., Universitas, I., & Bogor, D. (2021). *Penguatan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Melalui Pendirian Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah Di Desa Cianaga Kabandungan Jawa Barat Strengthening Independence of The Local Public Economy Through Establishment of Sharia Microfinance Institution In De*. 1(2), 65–69.
- Eni Widhajati, & Efriza Pahlevi Wulandari. (2021). Strategi Pemulihan Ekonomi melalui Sinergi Pemasaran Digital “LapakUMKM.Com.” *Janita : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.36563/pengabdian.v1i2.350>
- Hamid, E. S., & Susilo, Y. S. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(1), 45. <https://doi.org/10.23917/jep.v12i1.204>
- Harmoni, A. (2015). Dampak Sosial Ekonomi Perubahan Iklim. *Proceeding Seminar Nasional PESAT*, 2(3), 23–24.
- Harun, S. (2024). *Optimalisasi Blue Economy untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir : Studi Kasus di Kepulauan Sangkarrang*. 1, 1–9.
- Huberman, S. Mi. (2016). Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook. In *Sage* (3rd ed.). Arizona State University. <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>
- Huda, M. Si, H. M. (2025). Persepsi Pelaku Usaha terhadap Ketertelusuran Data Sosial Ekonomi Rajungan di Pantai Utara Jawa. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(2), 139. <https://doi.org/10.15578/marina.v10i2.14704>
- Intan Veronica, D., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap

- Pembangunan Berkelanjutan Dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 200–210. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.391>
- Judijanto, L., Rijal, S., Ahmad, M. I. S., & Harsono, I. (2024). Analisis Bibliometrik tentang Kewirausahaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3(03), 314–322. <https://doi.org/10.58812/jmws.v3i03.1050>
- Khairussalam, K., Zulaikha, S., Isnaeni Nur, R., & Maimunah, S. (2023). Analisis Modal Sosial dalam Kepemimpinan Kepala Desa Sewangi: Studi Kasus Berdasarkan Teori Modal Sosial Putnam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(2), 909–918. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.5280>
- Khakim, A. (2024). Pemkab Lamongan sebut produksi ikan tangkap capai 33 ribu ton. *Antara News*, 1. https://jatim.antaranews.com/berita/814067/pemkab-lamongan-sebut-produksi-ikan-tangkap-capai-33-ribu-ton?utm_source=chatgpt.com
- Laurensia, M. B., Pius, B. K., & Fransina, W. B. (2024). Peran Bank Indonesia Terhadap Binaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Kupang. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 323–332. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5741>
- Liu, E., & Sukmariningsih, R. M. (2021). Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi Digital Bagi Umkm Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 213. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3191>
- M. Indra Maulana, & Eko Suyono. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan dan Literasi Digital Terhadap Keberlanjutan Bisnis Pelaku UMKM Berbasis Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3)(03), 4256–4271.
- Madina, A., & Santoso, E. B. (2018). Adaptasi Peningkatan Resiliensi Ekonomi Masyarakat Berdasarkan Pemanfaatan Livelihood Assets di Kawasan Terdampak Kali Lamong Kabupaten Gresik. *Undergraduate Thesis*.
- Mealy, P., & Teytelboym, A. (2022). Economic complexity and the green economy. *Research Policy*, 51(8), 103948. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2020.103948>
- Monoarfa, T. A., Sumarwan, U., & Suroso, A. I. (2025). Switch or Stay ? Applying a Push – Pull – Mooring Framework to Evaluate Behavior in E-Grocery Shopping. *MDPI*, 15, 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su15076018> Academic
- Muhammad Misbakul Munir. (2021). Resiliensi Ekonomi Rumah Tangga Muslim Yogyakarta Masa Adaptasi Pandemi Covid-19. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.31949/maro.v4i1.856>
- Nasution, H., & Hakim, A. (2024). *Pemberdayaan Ekonomi Lokal Melalui Pelatihan dan Kolaborasi di Kampoeng Herbal Soerabaja*. 5(1), 95–105.
- Novianto, A. (2022). Resiliensi Ekonomi Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap Kawasan Perkotaan Studi di Kelurahan Keramasan Kota Palembang. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 8(2), 115–129. <https://doi.org/10.25077/jsa.8.2.115-129.2022>
- Nur Fauziah, M. (2022). Pengembangan Jaringan Usaha Dalam Perspektif Syariah Pada Umkm Kriya Kayu Untuk Menembus Pasar Ekspor. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, 1(1), 31–41. <https://doi.org/10.57171/jesi.v1i1.10>
- Pertiwi, G. (2020). Optimalisasi Pengembangan Umkm Berbasis Green Economy Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Jakarta State University*, June, 0–7.
- Prajanti, S. D. W., Margunani, M., Rahma, Y. A., Kristanti, N. R., & Adzim, F. (2021). Kajian Strategis Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 15(2), 86–101. <https://doi.org/10.35475/ripteck.v15i2.124>
- Susniwati, S., & Kurhayadi, K. (2020). Kolaborasi Tata Kelola Program BPJS Dalam Penanggulangan Defisit Program BPJS di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen ...)*, 4(2), 349–359.
- Tri Utami, R. (2022). Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat Pengenalan Digitalisasi Dalam Kegiatan Kewirausahaan PKBM Insan Mandiri Gemilang Kota Tangerang. *Jurnal Abdimas*, 2(1), 1–9. <https://journals.insightpub.org/index.php/jpm>
- Utami, B. D., Siswi Indrasti, N., & Dharmawan, A. H. (2008). Pengelolaan Sampah Rumahtangga Berbasis Komunitas: Teladan dari Dua Komunitas di Sleman dan Jakarta Selatan. *Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, Dan Ekologi Manusia*, 02(01), 49–68.

- Wahyu, D. M. (2020). DAMPAK REVOLUSI BIRU BAGI NELAYAN KECIL (Studi Nelayan Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Paradigma*, 9(2), 1–19.
- Waqiah, S., Studi, P., Syariah, E., & Pascasarjana, P. (2019). *KOMUNITAS PEREMPUAN JEMBER (STUDI KASUS KOMUNITAS PASAR KITA) TESIS Oleh : KOMUNITAS PEREMPUAN JEMBER (STUDI KASUS KOMUNITAS PASAR KITA) TESIS Diajukan Kepada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memper.*
- Xu, H., Wang, J., & Tai, Z. (2021). Empirical Study on the Factors Affecting User Switching Behavior of Online Learning Platform Based on Push-Pull-Mooring Theory. *MDPI*, 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/su13137087>
- Yamin, S., & Dartanto, T. (2023). Pengentasan Orang Miskin di Indonesia: Peran Modal Sosial yang Terlupakan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 17(1), 88–102. <https://doi.org/10.21002/jepi.v17i1.07>
- Yin, R. (2018). *Case Study Research Design and Methods* (pp. 1–180).
- Yusriadi, Y., Tahir, S. Z. bin, Awaluddin, M., & Misnawati, M. (2020). Pengentasan Kemiskinan melalui Socialpreneur. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 115–120. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2529>
- Zal-zabila, N. W., & Nur, A. C. (2024). *The Role of Women in Blue Economy Development Selayar Islands*. 11(2), 349–356. <https://doi.org/https://doi.org/10.71309/administrare.v11i2.5168>